

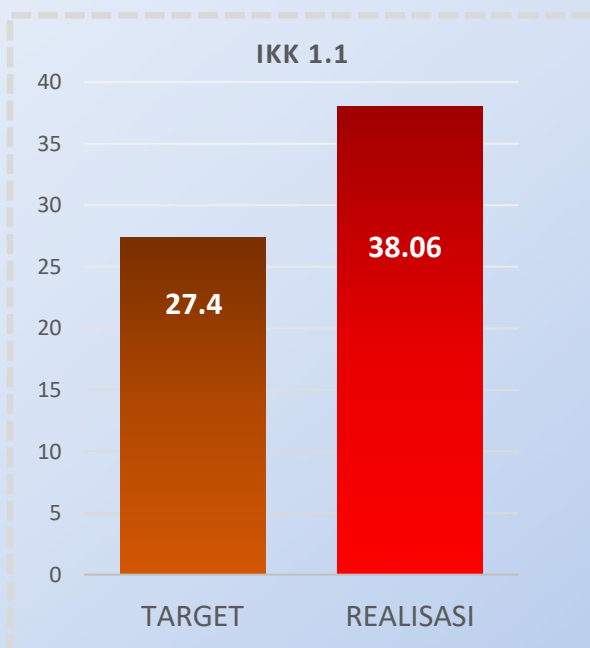
Ikhtisar Eksekutif

LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara.

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 menyajikan informasi tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran Kegiatan yaitu “Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan” dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan” dan “Terwujudnya Tata Kelola LPMP Provinsi Sumatera Utara yang baik” dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebagai berikut :

IKK 1.1. Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75.



Menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari laman PMP tahun 2020.

Ditetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 6,00.

Realisasi IKK 1.1 adalah 38,06% dari target sebesar 27,4% sehingga capaian kinerja = 138,91%.

IKK 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.



Menggunakan data hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara.

Persentase kesenjangan hasil AN Literasi = 6,16% , AN Numerasi = 6,83% dan Survei Karakter = 0,2% sehingga nilai rata-rata = 4,4%

Realisasi IKK 1.2 adalah sebesar 4,4% dari target sebesar 5% sehingga capaian kinerja = 113,64%.

IKK 1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan



Menggunakan data rapor dapodik *online*. Sebanyak 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Rapor Dapodik di atas 95%, dengan demikian realisasi IKK 1.3 = 100%.

Realisasi IKK 1.3 = 100% dibandingkan dengan target sebesar 95,2% maka Capaian kinerja IKK 1.3 adalah sebesar 105,04%.

IKK 2.1. Predikat SAKIP

Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	
Target	BB
Realisasi	BB
Dengan Interpretasi	Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

IKK. 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

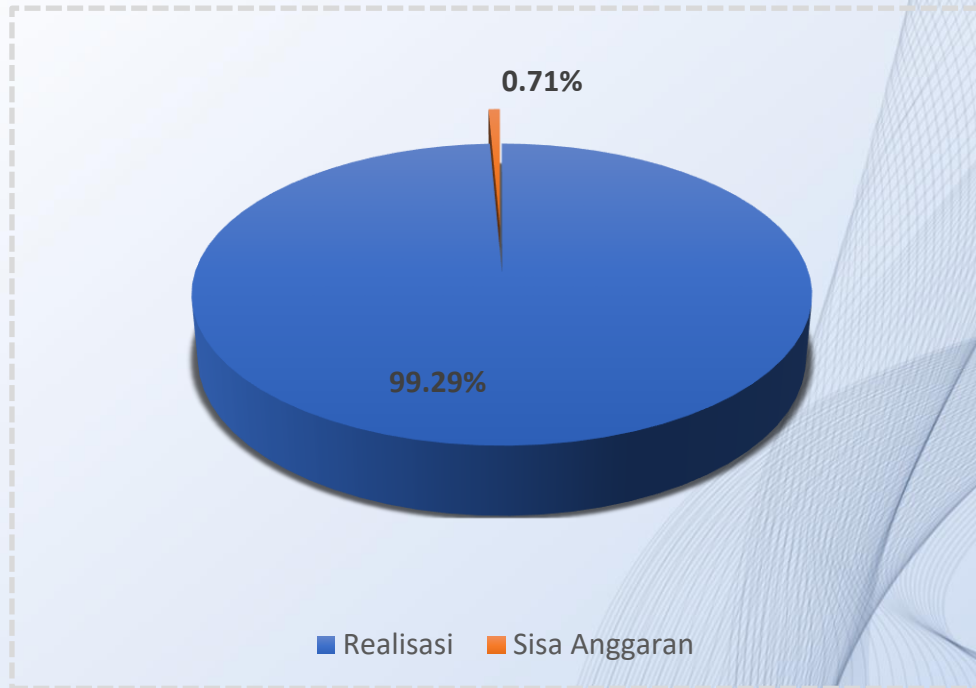


Nilai EKA = 95,96 dan nilai IKPA = 92,71, sehingga Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 = 94,66

Target yang tertera di Perjanjian Kinerja adalah 82.

Dengan demikian capaian kinerja adalah sebesar 115,44%.

Realisasi Anggaran



Grafik Persentase Kinerja Anggaran Tahun 2021

Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran

Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 29.510.748.000	Rp 29.302.366.289	99,29%

Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Kinerja :

HAMBATAN	SOLUSI
Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk pemenuhan mutu Standar Nasional Pendidikan.	Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu Standar Nasional Pendidikan.
Sinergi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah belum optimal.	Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah
Masih banyak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memahami maksud dan tujuan diadakannya Asesmen Nasional.	Melaksanakan pendampingan, <i>workshop</i> dan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Asesmen Nasional.
Masih terbatasnya kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami teknik Literasi dan Numerasi.	Melakukan pendampingan dan supervisi ke satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.
Masih banyak infrastruktur satuan pendidikan yang belum memadai melaksanakan Asesmen Nasional.	Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan infrastruktur satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional.
Masih banyak satuan pendidikan melaksanakan Asesmen Nasional belum sesuai POS.	Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan terkait persiapan Asesmen Nasional sampai kepada pelaksanaan Asesmen Nasional dan kepatuhan terhadap POS.
Belum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan LPMP dalam kegiatan dapodik.	Perlu regulasi yang mengatur keterlibatan LPMP dalam kegiatan dapodik.